

FOTO: ANTARA

DANA INSENTIF FISKAL UNTUK PERUMAHAN

Pekerja membangun kompleks perumahan di Boyolali, Jateng, Jumat (1/12). Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp3,7 triliun untuk insentif fiskal terkait perumahan pada 2023 dan 2024, dukungan tersebut mencakup pembelian rumah komersial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan rumah masyarakat miskin.



Pemerintah Gratiskan Pajak untuk UMKM yang Berlokasi di IKN

Yon Arsal menjelaskan, pemerintah memberikan insentif berupa superdeduction hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk para pelaku usaha yang memberikan sumbangsih dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif berupa tarif pajak 0 persen bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya di Ibu Kota Nagara (IKN) Nusantara.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, fasilitas insentif tersebut diberikan untuk UMKM yang mempunyai omzet sampai dengan Rp50 miliar per tahun.

"Bagi UMKM pun kita juga berikan fasilitas PPh 0 persen untuk seluruh UMKM

yang berlokasi dan berusaha di IKN, jadi cakupannya untuk seluruh wajib pajak baik yang skala besar, menengah, ataupun kecil kita berikan fasilitas," kata Yon Arsal dalam acara Roadshow Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat (2/12).

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, UMKM termasuk sebagai pihak yang mendapatkan insentif PPh 0 persen apabila beroperasi di IKN. Yon Arsal menilai berbagai insentif dari pemerintah tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha di IKN.

Kemenperin Wujudkan Komunitas Industri Hijau

JAKARTA (IM) - Sektor industri di Indonesia berperan vital sebagai penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang diorientasikan untuk mendukung peningkatan kinerja dan daya saing, sehingga menjaga kelangsungan dan keberlanjutan sektor industri.

"Kebijakan pengembangan industri saat ini sudah berada pada jalur yang benar atau on the right track. Hal ini ditunjukkan pada sejumlah capaian positif dari kinerja industri manufaktur nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (1/12).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 5,20 persen (y-on-y) pada triwulan III tahun 2023, yang melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen pada periode yang sama. Artinya, sektor manufaktur di tanah air masih bergeliat di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

Agus menegaskan, guna lebih memacu performa industri manufaktur nasional, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menjaga sektor industri untuk tetap berpegang pada prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. "Konsistensi dengan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan memajukan sektor industri, tetapi juga bisa menjamin kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui salah satu unit kerjanya, yakni

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) Semarang melaksanakan kegiatan Business Gathering dengan tema "Kolaborasi BBSPJPI dan Industri untuk Mewujudkan Komunitas Industri Hijau" di Semarang, Jumat (1/12).

Dalam sambutannya, Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi menyampaikan pentingnya upaya mendorong tumbuhnya komunitas industri hijau. "Selama ini, berbagai tindakan nyata telah diupayakan oleh Kemenperin guna memicu akselerasi pertumbuhan industri hijau," tuturnya.

Upaya tersebut, menurut Andi, harus selaras dengan dinamika pasar yang semakin terbuka, kompetitif seiring perkembangan teknologi, dan peduli akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. "Untuk itu, perlu adanya kolaborasi antar pemerintah, industri, dan instansi pendidikan dalam percepatan implementasi konsep industri hijau," ungkapnya.

Andi berharap BBSPJPI Semarang sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSKJI, dapat memberikan kontribusi nyata yang sejalan dengan program-program Kemenperin dengan tetap mengedepankan pelayanan yang inovatif, profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dunia industri mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.

Kepala BBSPJPI Semarang, Sidik Herman turut mengungkapkan, pihaknya berkomitmen terhadap pemeliharaan kesinambungan dan kualitas layanan dan siap berkolaborasi menjadi mitra bagi industri yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing dalam mewujudkan komunitas industri hijau. • dro

Diungkapkan Yon Arsal, pemerintah memberikan insentif berupa superdeduction hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk para pelaku usaha yang memberikan sumbangsih dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Kita juga memperkenankan superdeduction sumbangan, kalau orang mau menyumbang pada prinsipnya ketentuan yang berlaku umum tidak dapat insentif, tapi kalau di IKN kita berikan superdeduction untuk sumbangan, khususnya untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana yang ada di IKN," ujar

Yon Arsal.

Superdeduction atau insentif pengurangan pajak super merupakan insentif pengurangan pajak dari pemerintah bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu program tertentu.

Selain itu, superdeduction hingga 250 persen juga diberikan untuk perusahaan yang memberikan vokasi berupa magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), hingga pembelajaran bagi siswa didik di IKN. "Superdeduction yang juga kita siapkan. Kalau di Jakarta maksimal 200 persen, di IKN kita nanti bisa berikan 250 persen, dan untuk di bank itu 350 persen

lebih tinggi dari yang ada saat ini 300 persen di luar IKN," jelasnya.

Adapun sejak Juli 2023 lalu, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nagara (OIKN) juga telah melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal di IKN agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton saat IKN semakin ramai.

Para peserta yang mengikuti program tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. • pan

Pupuk Indonesia dan Bank Mandiri Kolaborasi untuk Green Financing

JAKARTA (IM) - PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjalin kerja sama untuk penyusunan Environmental, Social, And Good Governance (ESG) Framework dan potensi pemberian pembiayaan hijau (green financing) berbasis Sustainability Linked Loan. Hal itu bertujuan untuk mendukung hilirisasi industri ramah lingkungan di Indonesia.

Adapun kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan MoU antara Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dengan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di Dubai, Kamis (30/11).

"Untuk mewujudkan visi sebagai industri pupuk dan petrokimia global, saat ini Pupuk Indonesia sedang memfokuskan berfokus pada kekuatan untuk mengakselerasi dan menciptakan masa depan baru melalui hilirisasi industri yang lebih ramah lingkungan. Sehingga implementasi aspek ESG menjadi instrumen sangat penting dalam pengembangan bisnis kedepannya," kata

Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12).

Menurutnya, kerja sama ini adalah bagian dari program Pupuk Indonesia untuk menekan emisi karbon yang sejalan dengan tema COP28 atau konferensi tingkat tinggi Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB) di Dubai saat ini.

"Dalam COP28, para pemimpin dunia petinggi negara berdiskusi dan berkolaborasi dalam cara membatasi dan mempersiapkan diri untuk mitigasi dampak dan risiko perubahan iklim di masa depan," ujar Rahmad.

Dia mengatakan dalam kerja sama Pupuk Indonesia bakal mendapatkan pembiayaan dari Bank Mandiri. Menurutnya, pembiayaan tersebut berbasis skema Sustainability Linked Loan untuk berbagai proyek yang terkait dengan program ESG berkelanjutan.

"Antara lain proyek investasi soda ash Gresik & Bontang, energi baru terbarukan (EBT), pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan hijau, serta pengelolaan sumber daya alam hayati yang secara

berkelanjutan," jelasnya.

Sustainability Linked Loan adalah instrumen pembiayaan dari perbankan keuangan yang memberikan insentif kepada debitur untuk mencapai tujuan kinerja berkelanjutan yang telah ditetapkan. Dengan pembiayaan ini, Bank Mandiri dan Pupuk Indonesia menyepakati sepakat untuk menetapkan penerapan target-target keberlanjutan yang harus dicapai oleh Pupuk Indonesia.

"Dalam kesepakatan ini, terdapat komponen perjanjian berupa aspek keberlanjutan, seperti pengurangan emisi karbon dan juga transisi menuju aktivitas bisnis yang lebih bertanggung jawab ramah lingkungan serta berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat juga sosial," ungkapnya.

Sementara kerja sama yang ditandatangani pada COP28 mendorong potensi Pupuk Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di sektor energi bersih, baru dan terbarukan serta transisi energi menuju sistem energi rendah karbon. • dot



BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

PNBP Kementerian ESDM Tembus Rp250 Triliun

JAKARTA (IM) - Penyerahan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM hingga 27 November 2023 melampaui target dengan capaian 111%. Kementerian ESDM mencatat PNBP ESDM sekitar Rp250 triliun dengan target PNBP sebesar Rp225 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, dari angka tersebut, PNBP subsektor Mineral dan Batubara tahun ini, berhasil melesat dengan realisasi sebesar Rp152,16 triliun dari target Rp85 triliun.

"PNBP dari sektor mineral berada di angka Rp152,16 triliun. Secara persentase mencapai 178% dari target yang dicantumkan dalam APBN," jelas Dadan dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (1/12).

Dadan menjelaskan, PNBP subsektor mineral utamanya berasal dari peningkatan iuran produksi atau royalti batubara, dan merupakan dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Sehingga, meski rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami fluktuasi sepanjang tahun dan cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, namun kenaikan tarif royalti batubara mampu menutupi penurunan HBA tersebut.

"Dengan PP tersebut jadi ada peningkatan dari sisi harga di sisi tarifnya. Jadi yang awalnya misalkan 7 persen harga royalti, ada yang menjadi 13,5 persen. Sehingga ketika produksinya naik, kemudian harga untuk penerimaan itu juga naik kemudian penerimaan negaranya juga ikut naik," terangnya.

Dadan menambahkan, untuk PNBP sektor ESDM lainnya, yakni pada subsektor migas, realisasi yang dicatatkan sebesar Rp97 triliun atau sebesar 74,68% dari target yang tahun ini yang sebesar Rp131 triliun.

"Selangkan PNBP panas bumi dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun, yang sudah terealisasi mencapai Rp1,3 triliun, atau masih mencapai 64%. Untuk PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian ESDM melebihi target sebesar 123%, dari Rp438 miliar dan terealisasi sebesar Rp541 miliar. Untuk PNBP lainnya, terealisasi Rp4,4 triliun dari target di angka Rp6,2 triliun," paparnya.

Diungkapkan Dadan, pelaksanaan monitoring realisasi PNBP sektor ESDM dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi seluruh unit di Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Bank Data Penerimaan Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana monitoring target dan realisasi PNBP secara periodik. • pan

Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Sektor Perumahan Rp3,7 T

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa terobosan kebijakan diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek pengganda yang besar bagi perekonomian.

"Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk sektor perumahan," ujar Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Kemenkeu, Jumat (1/12).

Pemerintah memberikan dukungan untuk rumah komersial, rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan rumah masyarakat miskin dengan total yang diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024.

"Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menggerakkan sektor perumahan sehingga memberikan multiplier effect yang besar serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024," kata Febrio.

Hal tersebut dilakukan untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 tercatat 4,94 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,17 persen. Kondisi tersebut terjadi terutama akibat dampak menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa yang dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi di Tiongkok, serta gejolak di Amerika dan

Eropa. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah, serta potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Dukungan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal yang diterbitkan pemerintah di triwulan IV Tahun 2023. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan PPN DTP rumah tapak dan rusun untuk tahun anggaran 2024.

"Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan dukungan berupa PPN Ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah tapak, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun toko atau kantor, serta rumah susun, yang berfungsi sebagai tempat hunian," jelasnya.

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi rumah tapak atau rumah susun, yaitu harga jual paling tinggi Rp5 miliar, merupakan PPN terutang pada periode November hingga Desember 2023, sepanjang penyerahan fisik rumah, yang nantinya dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024. • pan

FOTO: ANTARA



BI CABUT UANG LOGAM TAHUN EMISI LAMA

Warga menunjukkan uang logam pecahan Rp1.000 dan Rp500 di Jakarta, Jumat (1/12). Bank Indonesia mencabut dan menarik uang rupiah logam pecahan Rp500 Tahun Emisi 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 dari peredaran terhitung sejak 1 Desember 2023 dikarenakan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan/material uang logam.